

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan data dan pembahasan dapat disimpulkan mengenai implementasi GCG di Koperasi Ranaka Kupang yairu:

1. Transparansi (*Transparency*)

Koperasi Ranaka menunjukkan transparansi melalui penyampaian informasi keuangan dan operasional secara terbuka kepada anggotanya. Indikator transparansi antara lain: a) Akses Informasi, laporan keuangan lengkap dan perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) dibagikan saat Rapat Anggota Tahunan (RAT), ditempel di papan pengumuman, dan dikirim melalui grup *WhatsApp*. b).Keterbukaan Dokumen, dokumen AD serta peraturan internal tersedia di kantor dan dapat diakses oleh anggota kapan saja tanpa syarat khusus. Pengurus membuka kesempatan kepada semua anggota. c). Komunikasi Dua Arah: Koperasi membuka sesi tanya jawab, kritik, dan usulan dalam RAT, di mana pengurus wajib memberikan jawaban yang jelas. d). Laporan Rutin: Terdapat laporan bulanan dan triwulanan yang dibahas dalam rapat pengurus, mencakup perkembangan pinjaman, simpanan, dan kas, yang ringkasannya diumumkan kepada anggota.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip ini terlihat dari kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban pengurus Koperasi Ranaka yang ditunjukkan dengan beberapa aspek dari jawaban responden yaitu: a). Pengelolaan Operasional: Manajer operasional menangani transaksi harian berdasarkan rencana anggaran biaya yang telah

disahkan oleh Rapat Anggota. Pengurus Koperasi Ranaka menunjukkan prinsip akuntabilitas ketika manajer operasional hanya menangani transaksi harian berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB) yang telah disahkan Rapat Anggota. b).Pengawasan Pengurus: Pengurus mengawasi tugas manajer dan karyawan secara ketat. Selain itu, pengurus wajib hadir di kantor pada hari-hari tertentu (Selasa, Kamis, dan Jumat) untuk membahas perkembangan keuangan. c). Pelaporan Berjenjang: Petugas penagihan wajib membuat laporan tagihan tepat waktu dan melaporkannya secara berkala kepada pengurus dalam rapat rutin bulanan dengan dokumen pendukung yang lengkap. d).Keputusan Tertinggi: Untuk masalah yang kompleks, keputusan akhir dibawa ke forum tertinggi, yaitu RAT atau Rapat Anggota Khusus (RAK. Dengan membawa persoalan kompleks ke forum tertinggi (RAT/RAK), pengurus Koperasi Ranaka menunjukkan bahwa mereka tidak memonopoli keputusan strategis, tetapi mempertanggungjawabkannya di hadapan anggota sebagai pemilik sesungguhnya koperasi.

3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Koperasi Ranaka memastikan kepatuhan terhadap aturan dan tanggung jawab sosial terhadap anggotanya dengan cara: a).Kepatuhan Hukum: Pengawas memantau kepatuhan koperasi terhadap hukum dan etika bisnis. b).Penanganan Keluhan: Setiap keluhan anggota dicatat dan dibahas dalam rapat pengurus, kemudian diberikan jawaban tertulis kepada anggota yang

bersangkutan. c). Solusi Adil: Dalam menangani anggota yang wanprestasi, koperasi berupaya mencari solusi yang adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Independensi (*Independency*)

Koperasi Ranaka dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan atau campur tangan pihak lain sebagai wujud Independensi dan dengan cara: a). Menghindari Konflik Kepentingan: Jika terdapat potensi konflik kepentingan, pengurus yang terkait tidak diperbolehkan ikut menentukan keputusan tersebut. b). Objektivitas Transaksi: Semua transaksi antara pengurus dan koperasi harus mendapatkan persetujuan RAT untuk menjaga objektivitas. c). Otonomi Petugas: Proses pengumpulan tagihan dilakukan secara independen tanpa campur tangan langsung dari pengurus dalam teknisnya, meskipun pengurus tetap menjamin kepatuhan prosesnya.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip keadilan diterapkan dalam pemberian layanan dan hak kepada seluruh anggota. Sehingga pengurus Koperasi Ranaka mewujudkan dengan cara: a). Kesetaraan Hak: Koperasi menerapkan kebijakan yang seragam di mana semua anggota memiliki hak yang sama untuk mengakses produk simpanan, pinjaman, maupun pelatihan tanpa diskriminasi. b). Standar Penilaian: Standar penilaian pinjaman berlaku sama untuk semua anggota

(kelayakan usaha dan disiplin pembayaran), tanpa ada perlakuan istimewa bagi pengurus dibandingkan anggota biasa. Prinsip fairness dalam konteks ini juga menekankan bahwa anggota yang menerima manfaat dari koperasi memiliki kewajiban untuk berkontribusi secara adil, sehingga tercipta hubungan saling menguntungkan dan penghormatan antar anggota. Dengan demikian, Koperasi Ranaka telah mengimplementasikan batas kewajiban dan meningkatkan keyakinan anggotanya

6.2 Saran

Penelitian ini menghasilkan beberap saran bagi Peneliti lainnya yaitu:

1). Perlu mengkaji secara khusus pada analisis peluang dan tantangan dengan menggunakan analisis SWOT untuk penganmbagan tata kelola koperasi simpan pinjam sehingga mampu berdaya saing. 2). Perlu mengkaji implementasi GCG dengan pendekatan teori agency dan teori